



JPAP

Jurnal Penelitian Administrasi Publik

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Untag Surabaya**

JPAP

Vol. 6 No. 1

Hal. 1 - 119

Maret 2020

ISSN : 2460 - 1586

Table of Contents

Kualitas Pelayanan Di Sektor Publik Dengan Perspektif NPS <i>Akhmad Irkham Tamami</i>	PDF
Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Berlakunya UU PSDN Untuk Pertahanan Negara <i>ZAINAL ABIDIN SAHABUDDIN, EGGY ARMAND RAMDANI</i>	PDF
Evaluasi Dana Desa (Studi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Garung Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan) <i>Yohanes Fritantus</i>	PDF
Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di Mts Negeri Jalaksana Kuningan <i>lukman nulhakim</i>	PDF
Fenomena Sosial Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi: Studi Kasus Masyarakat Penyangga Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Sorong Provinsi Papua Barat <i>Mutiono - -</i>	PDF
Dampak Desentralisasi dalam Otonomi Daerah pada Pengembangan Manusia di Indonesia <i>Wildan Taufik raharja, Khanifatul Khusna, Wafia Silvi Dhesinta</i>	PDF
Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Perwali Nomor 99 Tahun 2016 Untuk Mengatasi Pencemaran Air Limbah Pabrik (Studi Kasus Sungai Kalimas Surabaya) <i>Meyga Sisillia, Yulia Nurjanah, Tukiman Tukiman</i>	PDF
Efektivitas Kinerja Pelayanan Berbasis Sistem E-Health Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR. Soewandhi Surabaya <i>Wilya - Sulistiarini, Inka Mustika Sari</i>	

Dampak Desentralisasi dalam Otonomi Daerah pada Pengembangan Manusia di Indonesia

Wildan Taufik Raharja¹, Khanifatul Khusna², Wafia Silvi Dhesinta³

¹ raharja.wildan@hangtuah.ac.id

Program Studi Administrasi Negara, Universitas Hang Tuah Surabaya,
Jalan Arief Rachman Hakim Nomor 150 Keputih Sukolilo

Abstract

This study describes the concept of decentralization that addresses changes in operational tasks and delegation of authority in decision making from the central government to local governments. In other words, decentralization also considers as an instrument in the context of community empowerment related to human development nationally. Related to the implementation of the concept of decentralization in the era of regional autonomy, decentralization was designed to create new corruption in regional government. The majority of corruption was issued from the regional government in the last round. This study will answer the question of how the decentralization policy towards human development in Indonesia. This study uses secondary data analysis and literature review. Secondary data was obtained from the Central Statistics Agency which was then processed and reviewed based on the perspective of the researcher. Based on the results of the research that was thought about the implementation of the concept of decentralization in Indonesia, it was necessary to conduct a review related to supervision in the regions. The human development sustainability program in the area is determined by the commitment of the leader in carrying out his duties and role in running the government.

Keywords: *decentralization, regional autonomy, human development*

Abstrak

Studi ini menjelaskan konsep desentralisasi yang membahas perubahan dalam tugas operasional dan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan kata lain, desentralisasi berperan sebagai instrumen dalam konteks pemberdayaan masyarakat terkait pembangunan manusia secara nasional. Terkait dengan penerapan konsep desentralisasi di era otonomi daerah, desentralisasi disalahgunakan untuk menciptakan korupsi baru di pemerintahan daerah. Mayoritas korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada saat ini. Studi ini akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana kebijakan desentralisasi terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder dan tinjauan pustaka. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang kemudian diproses dan ditinjau berdasarkan perspektif peneliti. Berdasarkan hasil penelitian yang dipikirkan tentang implementasi konsep desentralisasi di Indonesia, maka perlu dilakukan tinjauan terkait dengan pengawasan di daerah. Program keberlanjutan pembangunan manusia di daerah ditentukan oleh komitmen pemimpin dalam melaksanakan tugas dan perannya dalam menjalankan pemerintahan.

Kata kunci: desentralisasi, otonomi daerah, pembangunan manusia

Pendahuluan

Istilah sentralisasi dan desentralisasi sering digunakan dengan mengacu pada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan otoritas mereka masing-masing, seolah-olah menunjukkan bahwa sebuah organisasi yang dicirikan sebagai terpusat sama sekali tidak memiliki karakteristik yang terdesentralisasi dan sebaliknya (Raman, 2015). Pergeseran dalam kewenangan pemerintahan dapat dipahami sebagai respon terhadap kapasitas kebijakan yang dibagikan antara tingkat pemerintahan yang terpusat dan terdesentralisasi. Tidak ada cara “terbaik” dalam mendesentralisasikan tanggung jawab dari pusat ke daerah, pembagian kapasitas kebijakan antara tingkat pusat dan pemerintah lokal membutuhkan pengaturan tata kelola yang tidak konsisten secara internal (Bannink, 2012). Menurut Huda (2014) bahwa desentralisasi adalah wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri

Ada kecenderungan sentralisasi jangka panjang dalam tata kelola kehutanan, dengan pembangunan bangsa dan penegasan kekuasaan atas sumber daya di pinggiran yang menjadi kekuatan kunci sentralisasi (Warman, 2016). Alasan yang utama dalam pengelolaan kehutanan yang terdesentralisasi adalah meningkatkan pembangunan pedesaan dan menghormati hak tradisional melalui pengaturan kelembagaan yang lebih bertanggung jawab dan responsif. Setelah kinerja buruk pembangunan di Negara Italia yang terpusat, sebagian besar kebijakan pembangunan sekarang menjadi tanggung jawab pemerintah lokal. Reformasi institusional dan konstitusional telah meningkatkan kompetensi dan otonomi tingkat pemerintahan yang lebih rendah, yang juga telah memungkinkan tanggung jawab yang lebih besar dalam perencanaan pembangunan (Solari, 2004).

Satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah desentralisasi dari sisi belanja (expenditure) bukan dari sisi pendapatan (revenue) (Haryanto dalam Hastuti, 2018). Tujuan desentralisasi fiskal bertujuan untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan negara, mendorong akuntabilitas dan transparansi

pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan antar daerah, menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, (Nurhemi dan Suryani 2015).

Desentralisasi fiskal yang lebih besar berimplikasi pada ketimpangan pendapatan individu yang lebih rendah, namun ketika pendapatan regional meningkat, desentralisasi berimplikasi pada penurunan ketimpangan yang lebih rendah (Tselios, 2012). Sementara beberapa kekuatan dan fungsi telah dialihkan ke pemerintah daerah, tujuan utama desentralisasi tampaknya sulit dipahami, di mana ada kurang dukungan dari peran masyarakat dalam meningkatkan sumber daya untuk pembangunan lokal, menuntut akuntabilitas dari para pemimpin mereka, berpartisipasi dalam perencanaan, dan memilih pemimpin mereka tanpa manipulasi dari 'elit' lokal pada saat pemilihan (Kakumba, 2010). Uganda telah membuat kemajuan dalam pelaksanaan desentralisasi, namun saat ini mereka akan melakukan resentralisasi, karena desentralisasi dianggap tidak menguntungkan politisi dan birokrat pemerintah pusat (Awortwi, 2011).

Indonesia telah memulai program desentralisasi yang ambisius yang ditujukan untuk memberdayakan pemerintah daerah dan memberi mereka otonomi yang jauh lebih besar dalam merumuskan anggaran dan melaksanakan pembangunan (Booth, 2003). Periode setelah 1965 sejarah penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan munculnya kelompok pembangunan di pemerintahan Indonesia (Yazid, 2014). Kemudian pada pemerintahan Orde Baru di Indonesia, peranan birokrasi Pemerintah dalam pelayanan publik telah berkembang dengan sangat pesat. Pengeluaran pemerintah untuk sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, perumahan dan perhubungan telah meningkat dari Rp. 414,3 milyar pada Pelita I menjadi Rp. 12.244,6 milyar dalam harga konstan pada Pelita IV.

Pada tahun 1998 terjadi reformasi yang merubah seluruh tatanan pemerintah dan merubah strategi pembangunan nasional dari sentralistik menjadi desentralisasi. Perubahan fundamental ini menjadi titik balik

pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun).

Tabel 1 Produk Domestik Bruto 2014

Ranking	Economy	(millions of US dollars)
1	United States	17,419,000
2	China	10,360,105
3	Japan	4,601,461
16	Indonesia	888,538
17	Netherlands	869,508
18	Turkey	799,535

Sumber: World Bank

Dengan sumber daya manusia yang banyak memang seharusnya memiliki PDB yang sangat besar juga, karena sumber daya manusia tersebut menjadi kunci dari pertambahan PDB dengan hasil produksi dari barang atau jasa masyarakat negara itu. Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa posisi Negara Indonesia berdasarkan Produk Domestik Bruto termasuk dalam 20 besar negara di dunia. Amerika Serikat sudah tidak bisa dipungkiri berada di posisi pertama dengan kemajuan ekonomi yang sudah mendunia yang kemudian disusul oleh negara China, Jepang, dan Jerman. Tetapi jika dilihat dari GDP per capita, posisi Indonesia merosot jauh pada posisi 131 dunia.

Tabel 2 GDP Per Capita Rank 2014

GDP/Capita Rank	Country Name	GDP per Capita
1	Qatar	97518,61
2	Norway	97363,09
3	China	96037,70
4	Australia	61886,96
131	Indonesia	3491,93
131	Bolivia	3235,77

Sumber : Diolah dari World Bank

GDP per capita merupakan total produk domestic bruto dibagi jumlah keseluruhan masyarakat di negara tersebut. Dengan GDP per kapita dapat

diketahui kondisi nyata masyarakat suatu negara. Tabel 1.2 menjelaskan rata-rata masyarakat Indonesia termasuk dalam keadaan golongan ekonomi medium ke bawah. Jumlah orang kaya di Indonesia sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat menengah ke bawah. Data tersebut dapat di jelaskan pada perbandingan tabel 1.1 dengan tabel 1.2 yang memperlihatkan posisi Indonesia dengan produk domestic bruto dapat menempati posisi 16 dunia, kemudian jika produk domestic bruto tersebut dibagi jumlah seluruh masyarakat Indonesia, maka posisi Indonesia turun pada 131 Dunia. Posisi Negara Indonesia di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura yang menempati posisi 7 dunia, kemudian Brunei Darussalam pada posisi 22 dunia, Malaysia pada posisi 66 dunia dan lain-lain. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak merata. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata berbanding lurus dengan pembangunan manusia antar daerah. Fakta-fakta tersebut yang menjadi research problem di artikel ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pembangunan manusia di Indonesia pada era otonomi daerah?

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder yang diperolaj dari Badan Pusat Statistik. Menurut Dachi (2017) metode analisis data sekunder sering dinamakan existing statistics. Sumber data sekunder dapat berasal dari database instansi, dokumen data statistic atau laporan hasil penelitian. Dalam penelitian analisis data sekunder peneliti mengumpulkan sumber-sumber informasi melalui sumber data yang ditemukan tersebut. Peneliti menata kembali atau mengkombinasikan informasi ke dalam cara baru untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang digunakan dimulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016.

Hasil

Desentralisasi Di Indonesia

Pada era awal kemerdekaan, pendiri bangsa ini sudah menerapkan konsep desentralisasi dengan tertulisnya Pasal 18 UUD 1945 dan kemudian di perjelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 sebagai undang-undang pemerintah daerah pertama di Indonesia. Kemudian pada tahun 1948 di terbitkan lagi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang mengatur mengenai daerah otonomi biasa dan daerah istimewa. Peraturan ini mengatur mengenai kewajiban apa saja yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan membagi menjadi tiga tingkatan daerah otonom, yaitu daerah tingkat I (provinsi), daerah tingkat II (Kabupaten dan kota besar), dan daerah tingkat 3 (Desa atau kota kecil). Selain itu juga pemerintah Indonesia juga membuat Undang-Undang Nomor 44 tahun 1950 tentang pemerintah daerah dan membentuk Negara Indonesia Timur (NIT) yang substansinya hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948.

Pada masa demokrasi terpimpin terjadi perubahan yang signifikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957. Peraturan ini menganut konsep otonomi secara riil yaitu pemerintah daerah memiliki wewenang yang sangat luas, sedangkan pemerintah pusat hanya memiliki wewenang sesuai dengan undang-undang. Kemudian presiden mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 jo. Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1960 yang lebih rinci mengatur mengenai otonomi secara riil, khususnya pertanggung jawaban kepala daerah tingkat I dan II kepada DPRD tingkat I dan II. Pada tahun 1965 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 yang menggantikan Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 jo. Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957. Dalam undang-undang ini menyebutkan pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD dan membagi NKRI menjadi 3 wilayah otonom, yaitu daerah tingkat I (provinsi), daerah tingkat II (Kabupaten atau kotamadya) dan daerah tingkat II (kecamatan/kotaparaja)

Pada masa orde baru otonomi daerah semakin nyata dan bertanggung jawab dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah dan Peraturan Pemerintah

Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada daerah tingkat II. Dengan adanya perturan ini wilayah NKRI terdiri dari daerah otonom dan wilayah administrasi berdasarkan prinsip desentralisasi, desentralisasi dan *medebewind*. Kepala daerah merupakan alat desentralisasi pemerintah pusat dan menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sehingga kepala daerah hanya menjalankan program-program dari pemerintah pusat.

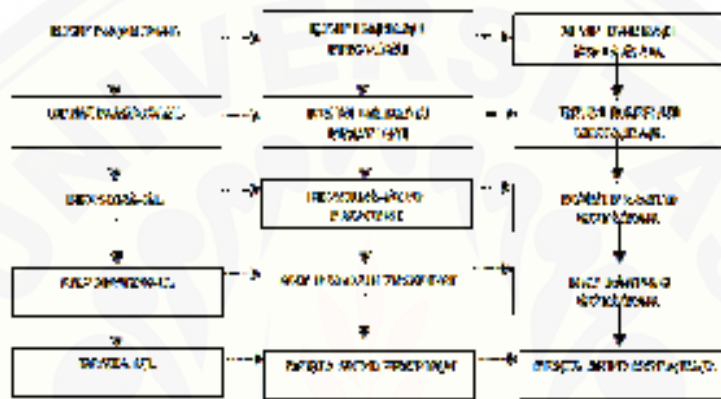
Sejarah baru terbentuk ketika era reformasi digulirkan, semangat reformasi menyentuh seluruh aspek tidak terkecuali pola hubungan pusat dengan daerah. Konsep otonomi daerah baru muncul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Peraturan ini memberikan wewenang kepada kepala daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. pemerintah pusat tidak hanya memberikan desentralisasi administrasi saja, tetapi juga desentralisasi fiskal melalui subsidi dari pusat yang bersifat *block grant*. *Check and balances* di pemerintah daerah juga diperkuat dengan memberikan kewenangan lebih DPRD sebagai kontrol kepala daerah. Namun peraturan ini masih dianggap belum memenuhi keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pada tahun 2004 lahir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut secara yuridis menghapus Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut memperjelas hubungan hierarki antara pemerintah pusat dengan provinsi dan provinsi dengan kabupaten atau kota. Selain itu peraturan ini juga mempertegas peran eksekutif dan legislative di pemerintah daerah. Tetapi peraturan ini dinilai masih belum efisien dan efektif, sehingga diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut semakin mempertegas tugas wewenang pemerintah daerah kota atau kabupaten dan pemerintah daerah provinsi

Kerangka Hukum Pembangunan Di Indonesia

Pada dasarnya pembangunan merupakan kegiatan yang telah direncanakan oleh suatu negara untuk menjadi lebih baik. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Ayat 2. Dari tujuan negara yang tercantum dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Oleh sebab itu negara harus menyusun rencana pembangunan sebagai arah pembangunan negara kedepan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan negara. Dengan adanya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pembangunan negara dapat terkoordinasi dan terarah dengan baik berdasarkan *blueprint* yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga konsistensi pembangunan negara tidak terganggu dengan inkonsistensi stabilitas politik yang cenderung berubah-berubah.

Dengan adanya undang-undang tentang otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Oleh sebab itu pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja, namun juga dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai *leading sector* pembangunan di daerah. Lebih lanjut Perencanaan Pembangunan Daerah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Kemudian dari RPJPD di *breakdown* ke dalam RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, setelah itu interpretasikan dalam RKPD yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



Gambar 1. Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Sumber: RPJP Nasional

Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi harus memuat visi dan misi arah pembangunan yang *in line* dengan RPJP Nasional. Kemudian dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota/Kabupaten harus *inline* dengan visi-misi arah pembangunan RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi. Kemudian dalam menyusun RPJMD, pemerintah daerah harus mengacu pada RPJPD yang sudah ditentukan sebelumnya dan berpedoman pada RPJMD serta melihat kondisi strategis daerah, seperti potensi daerah yang dapat dikembangkan. selain itu dalam penyusunan RPJMD juga harus melihat hasil evaluasi RPJMD sebelumnya.

Pembangunan Manusia Di Indonesia

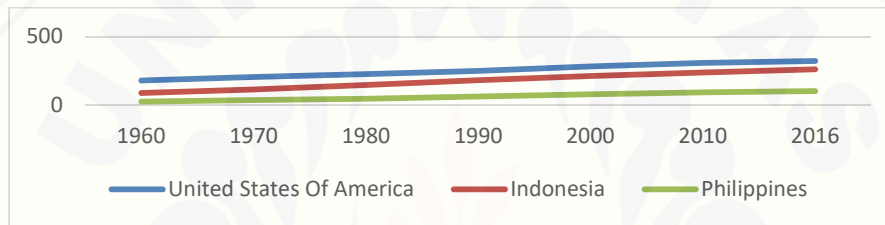
Irawan dan Suparmko (1979) dalam bukunya yang berjudul "*Ekonomi Pembangunan*" mengungkapkan terdapat 4 aspek tentang kependudukan yang perlu diperhatikan di negara sedang berkembang dalam upaya melakukan pembangunan

Pada maret 1976, penduduk dunia mencapai lebih 4 Milyar, PBB memproyeksikan pada akhir tahun 2000 menjadi lebih dari 6,5 Milyar dan pada akhir abad ke 21 mencapai lebih dari 15 Milyar. Persebaran penduduk tersebut 2/3 jumlah penduduk di seluruh dunia terdapat di negara sedang berkembang. Perkembangan penduduk memiliki peran ganda dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Yaitu dapat dilihat dari sisi permintaan dan penawaran. Permintaan penduduk dilihat dari sisi konsumen dan penawaran dilihat dari sisi produsen. Jika jumlah produsen tinggi dan kemudian diimbangi dari jumlah konsumen tinggi (konsumtif) juga akan terjadi pembangunan berhasil. Namun jika permintaan akan barang dan jasa sedikit karena rendahnya pendapatan penduduk maka secara otomatis akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan tentunya pembangunan. Prof A. Hansen (dalam Irawan dan Suparmoko, 1979) mengenai paham (*stagnasi sekular*) mengungkapkan jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menciptakan/memperbesar permintaan agregatif, terutama investasi. Teori tersebut diperkuat dengan para pengikut Keynes yang menjelaskan pertambahan penduduk tidak hanya bertambahnya penduduk saja, namun berdampak pada peningkatan jual beli penduduk.

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi khususnya bisnis, penduduk yang melimpah merupakan ladang bagi investor. Mereka melihat penduduk yang melimpah sebagai pasar yang harus dimaksimalkan, semakin tinggi jumlah penduduk disuatu negara semakin tinggi juga kebutuhan negara tersebut. Secara analogi sederhana kebutuhan masyarakat di daerah tertinggal dengan kebutuhan masyarakat di perkotaan berbeda khususnya mengenai konsumsinya, yang pada akhirnya para investor atau produsen lebih cenderung

berinvestasi di perkotaan daripada di pedesaan. Hal ini yang menyebabkan daerah yang tertinggal akan semakin tertinggal.

Kaum klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Maltus berpendapat bahwa selalu akan ada perlombaan antara tingkat perkembangan output dengan tingkat perkembangan penduduk yang akhirnya akan dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Di negara sedang berkembang, perkembangan penduduk justru menjadi rintangan bagi pertumbuhan ekonomi, karena minimnya modal untuk mengembangkan perekonomian. Produktivitas penduduk di negara-negara sedang berkembang sangat rendah, sehingga mengakibatkan rendahnya permintaan juga.



Gambar 2. Grafik Perbandingan Jumlah Populasi Indonesia dengan Negara Lain
Sumber: World Bank

Jika kita melihat jumlah penduduk di dunia, Indonesia duduk di peringkat 4 dengan 253 juta jiwa dan peringkat pertama di duduki oleh China dengan total penduduk 1,3 Milyar yang kemudian di ikuti oleh India dan Amerika Serikat. Laju pertumbuhan penduduk di negara berkembang seperti Indonesia dan India merupakan masalah pembangunan yang utama dan sangat sulit diatasi, berbagai ahli menyarankan masalah pertumbuhan penduduk di negara berkembang harus segera diatasi. Sehingga dapat mempercepat laju perkembangan ekonomi, yaitu dengan program menekan dan mengontrol laju pertumbuhan penduduk.

Dari ke 4 negara tersebut, hanya Amerika Serikat yang di anggap negara maju dan China juga mengklaim sebagai salah satu negara maju yang menjadi pesaing Amerika dalam hal ekonomi akhir-akhir ini. Jika kita cermati dan analisis dengan melihat kondisi di Negara China, jumlah penduduk yang banyak bukan merupakan masalah problema pembangunan jika kita dapat

mengontrol dan memaksimalkan sumber daya manusia. China telah berhasil mengontrol laju pertumbuhan penduduknya dengan membuat kebijakan yang sangat kontroversial. Yaitu membatasi kepemilikan anak, yaitu hanya boleh memiliki 1 orang anak. Selain itu juga dengan memiliki banyak sumberdaya daya manusia, menjadikan upah tenaga kerja di China jadi rendah. Sehingga dapat bersaing dengan industry-industry di pasar global

Struktur umur masyarakat di suatu negara akan mempengaruhi produktifitas kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kelahiran dan kematian. Pertumbuhan penduduk di negara sedang berkembang adalah akibat tingkat kelahiran yang tinggi dibarengi oleh tingkat kematian yang menurun. Tingkat kelahiran yang tinggi ini dalam banyak hal menyebabkan bahwa pola usia penduduk cenderung pada usia anak-anak, sehingga penduduk yang dewasa dan menduduki yang secara ekonomis adalah usia paling produktif, berkurang secara proposional. Tingkat kematian menurun terutama pada lapisan penduduk berusia rendah, seperti bayi dan anak-anak, sehingga proporsi anak meningkat. Struktur penduduk dengan pola usia dan burden of dependency seperti ini pada umumnya tidak menumbuhkan semangat pembangunan.



Gambar 3. Piramida Populasi Indonesia Tahun 2015

Sumber : Bappenas and BPS

Dari gambar piramida penduduk Indonesia itu dapat dilihat bahwa komposisi atau model piramida menjelaskan banyaknya angka kelahiran bayi dan rendahnya angka kematian. Model ini indentik dengan negara yang sedang

berkembang. Penduduk tua lebih sedikit daripada penduduk usia muda yang menandakan pertumbuhan penduduk sangat tinggi.

Kemudian berdasarkan hasil riset dari Mc Kinsey Global Institute (2012) bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketujuh di dunia pada 2030 (Oberman, 2012). Karena pada masa itu nantinya Indonesia akan mengalami bonus demografi, yaitu penduduk dalam suatu negara rata-rata usianya berada dalam masa produktif, antara 15 hingga 64 tahun. Dengan demikian, penduduk usia produktif itu berpotensi untuk menumbuhkan perekonomian negara.

Manusia sebagai dasar untuk pembangunan merupakan komponen terpenting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Jumlah penduduk dapat menentukan kerelatifan pembangunan, pada daerah yang padat penduduknya maka pembangunannya pun akan lebih banyak dibanding dengan daerah berpenduduk sedikit. Luas wilayah tidak begitu mempegaruhi karena bisa saja daerah yang luas dengan tingkat pembangunannya rendah dapat menjadi ancaman pembangunan daerah.

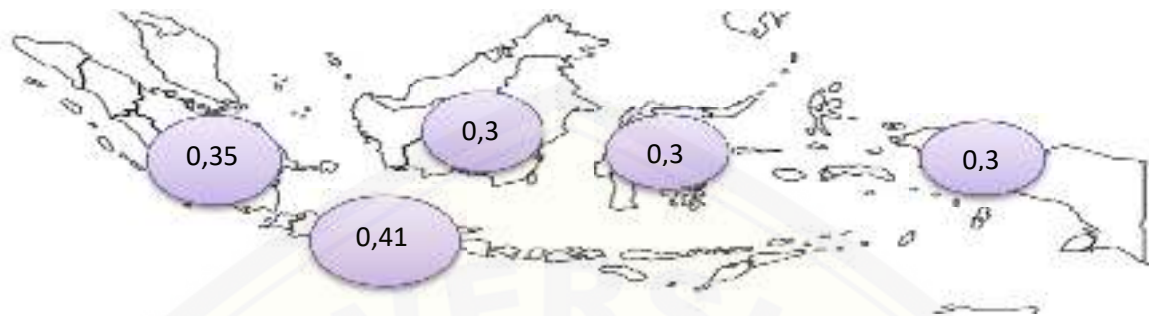


Gambar 4 Kepadatan penduduk di Indonesia tahun 2015

Sumber: BPS

Gambar 4 memperlihatkan kepadatan penduduk yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari situ dapat dilihat bahwa persebaran penduduk Indonesia tidak merata yang mengakibatkan ketimpangan sosial. Wilayah yang penduduknya paling padat terletak di Pulau Jawa dan sekitarnya seperti Bali dan Mataram. Jumlah kepadatan penduduk memang sangat mempengaruhi pembangunan khususnya perekonomian. Daerah yang penduduknya padat

pembangunannya akan cenderung tinggi dibandingkan daerah dengan wiayah kepadatan penduduknya rendah. Hal itu bisa dilihat dari Gini rasion Indonesia saat ini



Gambar 5 Distribusi Koefisien Indeks Gini Indonesia Tahun 2015
Sumber: BPS

PDB Negara Indonesia dalam kurun waktu selama 10 tahun tumbuh sekitar 4,35 persen pertahun dan menempatkan Negara Indonesia masuk dalam 20 besar perekonomian di dunia. Namun pertumbuhan tersebut masih belum dapat mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan. Gambar 2.3 memperlihatkan ginis rasio yang tertinggi justru terletak di pulau jawa yang memiliki jumlah dan kepadatan penduduk paling tinggi di Inonesia. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pembangunan di daerah maka akan semakin meningkatkan ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dinikmati oleh golongan masyarakat yang memiliki berpendapatan menengah ke atas, sedangkan masyarakat golongan menengah ke bawah semakin tertekan dengan kebutuhan yang semakin meningkat

Kualitas Tenaga Kerja Atau Sumber Daya Manusia

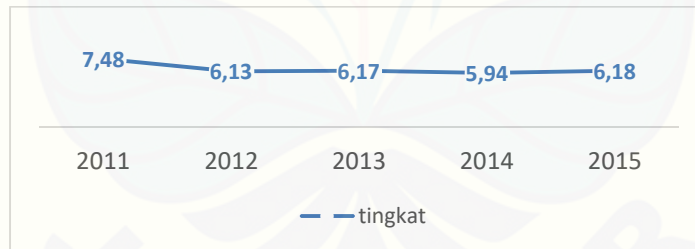
Jumlah penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia dapat menjadi penghambat pembangunan itu sendiri. Karena pembangunan yang berpusat manusia sangat tergantung pada kualitas penduduknya. Kualitas sumber daya manusia di suatu negara dapat dilihat dari tingkat pendidikan setiap individunya. Semakin tinggi tingkat pendidikan individu maka kualitas tenaga kerja dapat dikatakan semakin baik.

Tabel 3 Persentase Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2015

Daerah, Wilayah, Kelamin	Jenjang Pendidikan	2015					
		Persentase (%)	Persentase (%)	Persentase (%)	Persentase (%)	Persentase (%)	Persentase (%)
Indonesia	Lulusan	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95
	Peringkat	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95
	Kategori	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95
Perkotaan	Lulusan	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99
	Peringkat	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99
	Kategori	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99
Pedesaan	Lulusan	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
	Peringkat	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
	Kategori	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72

Sumber: BPS

Tabel di atas menggambarkan penduduk usia produktif berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan. Jenjang pendidikan terakhir di perguruan tinggi hanya mencapai 7,95 persen di seluruh Indonesia. Jika dilihat dari tempat tinggal atau wilayah, daerah perkotaan mencapai 11,99 persen, sedangkan di daerah pedesaan hanya mencapai 3,72. Hal ini menandakan terdapat ketimpangan pendidikan di kota dan di desa yang menjadikan desa sulit untuk berkembang



Gambar 6. Tingkat pengangguran terbuka

Sumber: BPS

Jumlah pengangguran dari tahun ke tahun sangat dinamis dari tahun 2011 yang mencapai 7,48 persen menurun pada tahun 2012 mencapai 6,13 persen. Kemudian pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi 6,17 persen. Pada tahun 2014 turun lagi pada 5,94 persen, seiring perekonomian yang lesu pada akhir-akhir ini menjadikan pada tahun 2015 pengangguran meningkat lagi mencapai 6,18 persen. Pengangguran selain disebabkan oleh minimnya lapangan pekerjaan juga dikarenakan kualitas rendahnya tenaga kerja di Indonesia. Dengan adanya globalisasi menuntut modernisasi yang

menyebabkan tuntutan kualitas tenaga kerja juga tinggi. Jika tidak diimbangi oleh tenaga kerja dengan kualitas tinggi maka akan banyak terjadi pengangguran. Tenaga kerja asing akan masuk ke Indonesia dengan perjanjian ekonomi terbuka yang dilakukan oleh Negara Indonesia dengan negara-negara lain. Jika tenaga kerja Indonesia tidak bisa bersaing dengan tenaga kerja asing, maka akan mengakibatkan peningkatan pengangguran di Indonesia.

Berdasarkan gambaran mengenai kondisi penduduk di Indonesia yang telah dipaparkan sebelumnya, pembangunan yang berpusat manusia merupakan tantangan berbagai negara ini. Konsep pembangunan dengan pendekatan pembangunan komunitas lokal dengan mensyaratkan partisipasi yang tinggi dan demokrasi yang bersih menjadi pertaruhan keberhasilan pembangunan negara. Di sisi lain, pembangunan model ini merupakan peluang bagi Negara Indonesia dalam menghapus ketimpangan ekonomi dan ketimpangan social.

Pembahasan

Human Development Index merupakan suatu alat ukur pembangunan negara yang menggunakan kriteria kemampuan individu penduduk bukan hanya berdasarkan perkembangan ekonomi saja, namun diukur berdasarkan pendidikan dan kesehatan.

Tabel 4. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014

Ranking	Countries
1	Norway
2	Australia
3	Switzerland
110	Gabon
111	Indonesia
112	paraguay
113	palestina

Sumber: UNDP

Berdasarkan UNDP, pada tahun 2014 Human development index secara global menempati posisi 111 dunia di bawah Negara Gabon yang merupakan salah satu negara kaya di Benua Afrika dengan sumber daya minyak bumi yang

melimpah. Sedangkan jika pada level Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi 5 di bawah Negara Thailand. Singapore menjadi Negara dengan Human Development Index tertinggi di Asia Tenggara, kemudian disusul oleh Malaysia, dan Brunei Darusalam. Secara histori, Negara Indonesia merupakan negara tertua jika dibandingkan dengan negara tetangganya, seperti Singapore dan Malaysia. Namun HDI Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tersebut.



Gambar 7. HDI trends for Indonesia, Vietnam and Thailand,
Sumber: UNDP

Berdasarkan grafik di atas HDI Indonesia memiliki tren yang positif dimana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Bahkan jika dibandingkan dengan Thailand, HDI Negara Indonesia masih tertinggal jauh. Negara Vietnam yang memulai membuka dengan dunia luar, memiliki tren HDI yang cukup baik dengan menempel ketat di bawah Indonesia

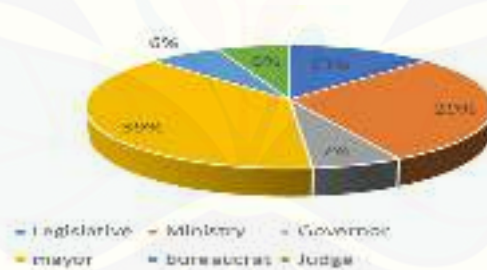


Gambar 8. Distribution of Human Development Index in Indonesia
Sumber: BPS

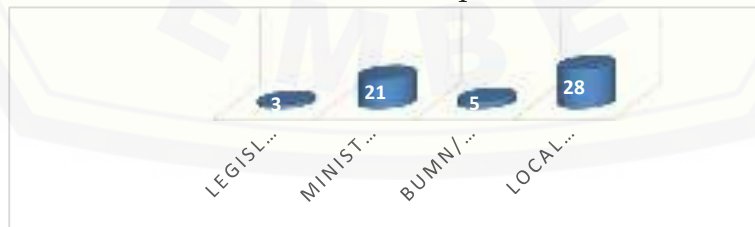
Kemudian untuk distribusi HDI di Indonesia masih belum merata. Di wilayah perkotaan pertumbuhan HDI pada level sangat tinggi hanya sekitar 6,1%, dan pada level tinggi sekitar 83,7%. Sedangkan pada daerah pedesaan, pertumbuhan HDI pada level sangat tinggi hanya 0,2 %, level tinggi 10%, Level sedang 77,2%, dan level rendah 12,5%. Dari gambar 4.???. Pertumbuhan HDI di

Indonesia sangat tinggi berada di provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bali, Provinsi Yogyakarta, Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Timut. Sedangkan wilayah dengan pertumbuhan HDI paling rendah berada di Papua.

Fakta tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya desentralisasi atau pemberian wewenang dalam program pembangunan kepada pemerintah daerah menyebabkan tingkat ketimpangan yang sangat tinggi. Tidak hanya ketimpangan dalam hal ekonomi saja, namun ketimpangan dalam pembangunan manusia. Desentralisasi secara signifikan belum dapat meningkatkan pendapatan per kapita di Negara Sri Lanka, ada ketidakseimbangan pembangunan yang sangat besar antar daerah, dan pejabat publik di lapisan bawah pemerintah tidak kompeten memanfaatkan keuntungan dari desentralisasi (Herath, 2009). Herath melihat kegagalan desentralisasi di Negara Srilangka terjadi karena ketidak siapan pejabat pemerintah lokal dalam memanfaatkan peluang desentralisasi. Hal tersebut juga terjadi di Indonesia, selama desentralisasi diimplimentasikan di Indonesia, terjadi perpindahan tindak pidana korupsi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.



Gambar 9. Grafik Prosentase Korupsi Berdasarkan Kependudukan
 Sumber: Indonesia's Corruption Eradication



Gambar 10. Grafik Prosentase Korupsi Berdasarkan Lembaga/Instansi
 Sumber: Indonesia's Corruption Eradication

Pada tahun 2014, tindak pidana korupsi terbesar dilakukan oleh kepala daerah yang mencapai 46%, yaitu pada level pemerintah daerah kota/kabupaten sebanyak 39% dan pada level pemerintah daerah provinsi mencapai 7%.

Kemudian pada tahun 2015 jumlah tindak pidana korupsi di pemerintah daerah meningkat dari 14 kasus menjadi 28 kasus tindak pidana korupsi. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia perlu dilakukan evaluasi. Desentralisasi yang bertujuan untuk mempercepat dan meratakan pembangunan menjadi masalah bagi pembangunan di Indonesia.

Kesimpulan

Desentralisasi diharapkan dapat meratakan pembangunan di daerah-daerah, karena setiap daerah memiliki otoritas kebijakan pembangunan sendiri-sendiri. Setiap pemerintah daerah dapat memilih program pembangunan apa yang bersifat penting dan mendesak. Namun setelah hampir dua dekade kebijakan desentralisasi dilaksanakan, ketimpangan antar daerah meningkat, baik dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia. Kemudian pada distribusi HDI, di wilayah perkotaan pertumbuhan HDI pada level sangat tinggi hanya sekitar 6,1%, dan pada level tinggi sekitar 83,7%. Sedangkan pada daerah pedesaan, pertumbuhan HDI pada level sangat tinggi hanya 0,2 %, level tinggi 10%, Level sedang 77,2%, dan level rendah 12,5%. Dari fakta tersebut, kebijakan desentralisasi perlu dievaluasi, khususnya pada peran pemerintah daerah dalam pembangunan. Desentralisasi menyebabkan tindak pidana korupsi yang cenderung dilakukan di pemerintah pusat beralih pada tingkat pemerintah lokal. Keberhasilan pembangunan dengan *leading sector* pemerintah daerah sangat ditentukan oleh integritas dan komitmen kepala daerah. Karena kepala daerah memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan prioritas pembangunan di daerahnya.

REFERENSI

Awortwi, Nicholas. 2011. *An unbreakable path? A comparative study of decentralization and local government development trajectories in Ghana and Uganda. International Review of Administrative Sciences* 77(2) 347–377, DOI: 10.1177/0020852311399844

- Bannink, Duco and Ringo Ossewaarde. 2012. Decentralization: New Modes of Governance and Administrative Responsibility. *Administration & Society* 44(5) 595– 624. SAGE Publications DOI: 10.1177/0095399711419096
- Booth, Anne. 2003. *Decentralisation and poverty alleviation in Indonesia. Environment and Planning C: Government and Policy*, volume 21, pages 181- 202 DOI:10.1068/c0127
- Dachi, Rahmat Alyakin. 2017. Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan (Suatu Pendekatan Konseptual). Yogyakarta. Deepublish
- GDB Ranking, The world Bank, diakses dari <http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table> tanggal 1 juni 2016
- GDP Per Capita, World Bank, diakses dari: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?order=data_value_2014+wbapidata_value+wbapi_data_value-last&sort=desc pada tanggal 1 juni 2016
- Hastuti, Proborini. 2018. Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. Snkn 2018 | Simposium Nasional Keuangan Negara
- Huda, Ni'matul. 2014. Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otsus. Bandung: Nusa Media
- Irawan, Suparmoko. 1979. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: BPEE
- Irawan, Suparmoko. 2009. Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta. BPEE
- Kakumba, Umar. 2010. Local government citizen participation and rural development: reflections on Uganda's decentralization system. *International Review of Administrative Sciences*, Vol 76(1):171–186 [DOI:10.1177/0020852309359049
- Nurhemi dan Guruh Suryani. 2015. Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 18, Nomor 2, Oktober 2015, 183-205
- Oberman, Raoul et al. 2012. *The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential*. McKinsey Glibal Institute:
- Raman, G. Venkat. 2015. Decentralisation as a Developmental Strategy in China: A Development Model for Developing Countries. Sage Publications New Delhi/Thousand Oaks/London DOI: 10.1177/000944550604200402
- Solari, Stefano. 2004. Decentralisation of Competencies and Local Development Agencies in North-Eastern Italy. *Local Economy*, Vol. 19, No. 1, 55–68. DOI: 10.1080/0269094032000168442

Tselios, Vassilis et al. 2012. Income inequality, decentralisation, and regional development in Western Europe. *Environment and Planning A*, volume 44, pages 1278 – 1301. doi:10.1068/a44334

Warman, Russell. 2016. Decentralization and forestry in the Indonesian archipelago: beyond the big Bang. *South East Asia Research*, 24, 1, pp 23–40 doi: 10.5367/sear.2016.0294

Yazid, Mohd and Mat, Noor . 2014. *The Indonesian Economic Development after 1965: Developmental State, Radical Politics & Regional Cooperation. Sop Transactions On Economic Research*. Volume1,Number 3, September 2014.

